

BAB V

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage*, opini BPK, dan tingkat kemandirian keuangan pemda terhadap *internet reporting* dengan kompetisi politik sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan obyek penelitian pemerintah provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, terdapat dua hipotesis diterima dari enam hipotesis yang diajukan, variabel tersebut adalah *leverage* dan tingkat kemandirian keuangan pemda. Rasio pembiayaan hutang (*leverage*) yang rendah memiliki implikasi bahwa pengeleloaan daerah tersebut tergolong baik sehingga kecenderungan pemerintah daerah untuk memuplikasi laporan kinerjanya melalui internet semakin besar. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah yang tinggi juga mengimplikasikan bahwa daerah tersebut berhasil memaksimalkan pendapatan daerahnya, sehingga sehingga kecenderungan pemerintah daerah untuk memuplikasi laporan kinerjanya melalui internet semakin besar.

Kedua, Opini BPK tidak mampu memengaruhi pelaporan keuangan melalui internet pemerintah daerah karena data penelitian yang konstan atau memiliki nilai yang sama mengakibatkan alat olah data tidak dapat mengolah

data tersebut sehingga disimpulkan Opini BPK tidak berpengaruh terhadap *internet reporting* akibat kondisi tersebut.

Ketiga, *leverage*, Opini BPK, dan tingkat kemandirian keuangan pemda yang dimoderasi oleh kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap internet reporting. Hasil penelitian menunjukkan kompetisi politik cenderung memperlemah tingkat signifikan dari variabel independen, sehingga hal tersebut berbanding terbalik dengan hipotesis yang diajukan. Kondisi seperti ini dipengaruhi oleh belum dianggap pentingnya *internet reporting* oleh pemerintah, sehingga peranan legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut didasarkan pada fakta lapangan dimana pada tahun 2017 hanya 1 dari 34 provinsi di Indonesia yang sudah melaporkan secara lengkap sesuai Instruksi Menteri dalam negeri No.188.52/1797/SJ/2012, Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian seperti ditambah tahun pengamatan, sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat menguji teori dengan baik.

2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat mempertimbangkan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi *internet reporting* atau mengganti variabel moderasi guna mengetahui variabel-variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independent dengan dependen.
3. Untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel kompetisi politik dapat mempertimbangkan proksi lainnya, dikarenakan untuk proksi pada penelitian ini dirasa kurang dapat menggambarkan realitas lapangan akibat dari selisih antara pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang tidak dilakukan pada waktu yang sama. Hal tersebut mengakibatkan kompetisi politik yang terjadi disuatu daerah akan bias.

C. Keterbatasan

1. Masih rendahnya kemampuan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dalam memengaruhi variabel dependen.
2. Tahun pengamatan yang hanya dilakukan satu tahun mengakibatkan salah satu variabel tidak memiliki variasi nilai yang berakibat pada data variabel tersebut tidak dapat diolah dengan SPSS.